

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 1938/Pid.B/2015/PN.Mks)



**OLEH
EKO SOFYAN EFENDY
B111 13 349**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 1938/Pid.B/2015/PN.Mks)**

OLEH:

EKO SOFYAN EFENDY

B111 13 349

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN

(Studi Kasus Putusan No. 1938/Pid.B/2015/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

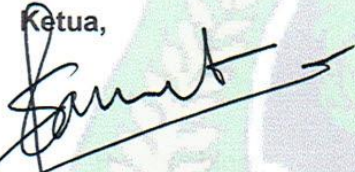
EKO SOFYAN EFENDY

B111 13 349

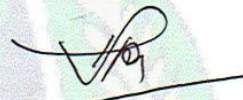
Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 29 Mei 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,

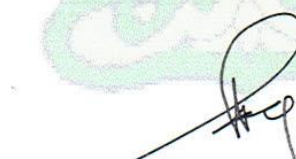

Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM.
NIP. 19680411 199203 1 001

Sekretaris,



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP.19661212 199103 2 002

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan**


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Eko Sofyan Efendy

NIM : B111 13 349

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan
(Studi Kasus Putusan No. 1938/Pid.B/2015/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH., MH., DFM
19680411 199203 1 001

Pembimbing II



Dr. Haeranah, SH., MH.
19661212 199103 2 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

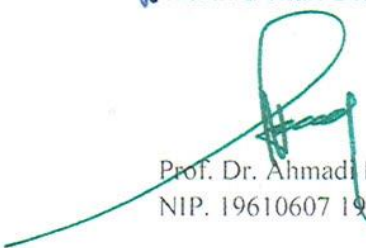
Nama : EKO SOFYAN EFENDY
Nomor Pokok : B11113349
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan No.1938/Pid.B/2015/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,


Prof. Dr. Ahmadi Miru,SH.,MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

EKO SOFYAN EFENDY, (B11113349) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Kasus Putusan No. 1938/Pid.B/2015/PN.Mks), di bawah bimbingan oleh Slamet Sampurno sebagai Pembimbing I dan Haeranah sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan pidana materiil tentang tidak pidana penadahan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara dengan nomor putusan : 1938/Pid.B/2015/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya pada Pengadilan Negeri Makassar dengan mengambil data yang relevan serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, dalam hal ini Hakim yang menangani perkara ini. Di samping itu penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : (1) penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam perkara putusan nomor: 1938/Pid.B/2015/PN.Mks. yang didasarkan pada fakta-fakta hukum dan barang-barang bukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis, yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa, dimana dalam kasus ini jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara. (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam perkara putusan nomor: 1938/Pid.B/2015/PN.Mks. yakni dengan terlebih dahulu mempertimbangkan fakta dalam persidangan yang merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan hal tersebut, oleh karena tidak diperolehnya alasan penghapusan pidana yang membuat terdakwa lepas dari jerat hukum maka hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 6(enam) bulan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan bagi terdakwa.

ABSTRACT

EKO SOFYAN EFENDY, (B11113349) JURIDICAL REVIEW OF CRIME CRIME CASE (Case Study of Decision No. 1938 / Pid.B / 2015 / PN.Mks), under the guidance of Slamet Sampurno as First Coach and Haeranah as Supervisor II. This study aims to find out how the application of material criminal provisions on non-criminal penalaran and to know the judge's legal considerations in imposing the criminal in the case with the decision number: 1938 / Pid.B / 2015 / PN.Mks.

This research was conducted in Makassar City, especially at the Makassar District Court by taking relevant data and conducting interviews with related parties, in this case the Judge handling this case. In addition, the authors also conduct literature studies using various literature and legislation related to the problems discussed in this thesis.

The results obtained in this study are: (1) the application of the material criminal law to the criminal act of penalaran in the case of decision number: 1938 / Pid.B / 2015 / PN.Mks. Which is based on legal facts and evidence. It is also based on juridical consideration, namely the indictment and prosecutor's demand, where in this case the prosecutor uses a single charge namely Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code. The prosecutor charged the defendant with imprisonment for 6 (six) months was reduced while the defendant was detained temporarily. (2) Judge's consideration in imposing criminal sanction on perpetrators of criminal act of ruling in the case of decision number: 1938 / Pid.B / 2015 / PN.Mks. ie by first taking into account the facts in the proceedings which are the cumulative conclusions of the statements of witnesses, the statements of the accused, the attention of the evidence presented and examined in the hearing, and the factors relating thereto, because the reason for the abolition of the defendant Regardless of the legal punishment, the judge who decides this case shall impose a 6 (six) month imprisonment, taking into account the matters which may be lighten and burdensome for the defendant.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1938/Pid.B/2015/PN.Mks)” sebagai persyaratan wajib mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang disertai dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka maupun duka. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan

ucapan terimakasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik dari segi materil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Rusli Efendi dan Ibunda Hj. Nurhaeni B. yang senantiasa memberi pengarahan, dukungan moril maupun materil, kasih sayang, serta doa kepadapenulis dalam suka dan duka.
2. Seorang spesial Nurhidayah, S.H, yang sangat membantu dan mendorong dalam penyelesaian skripsi ini dan para saudara-saudara perjuangan Mohammad Kurniawan, Satya Graha, Ismail Iskandar, S.H, Andi Suharmika, S.H, Ahmad Rais Setiawan, Aldias Agung Liawi, S.H, Andi Moh. Maqarim, Fadel Muhammad, S.H, Muh. Akram, Zulfikar, S.H, Muhammad Fadly, S.H, dan lain lainnya yang senantiasa memberidukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini .
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.,DFM dan Ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H selaku pembimbing atas segala bimbingan, arahan, dan perhatiannya dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.
4. Ibu Prof. Dr. A. Farida Patingtingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Pembantu dekan III, dan seluruh dosen

pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. Bapak Prof. Dr. Syukri Akub, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Selaku penguji yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Maskun, S.H., L.LM. selaku Penasehat Akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan beserta Staf dan Jajarannya yang telah membantu Penulis selama proses penelitian.
9. Teman-teman ASAS Angkatan 2013 serta rekan-rakan lain yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
10. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Basket Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) Universitas Hasanuddin.

12. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu atas komentar dan pendapatnya mengenai kasus yang saya teliti.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua, amin.

Makassar, Juni 2017

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iii
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Yuridis.....	6
B. Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	10
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	12
C. Tindak Pidana Penadahan	16
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan	18
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penadahan.....	20
D. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim	21

1. Pengertian Putusan Hakim	21
2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....	23
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi Penelitian	35
B. Jenis Dan Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penadahan (studi kasus putusan No. 1938/Pid.B/2015/PN.Mks)	40
B. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan dalam perkara tindak pidana penadahan dalam Putusan No. 1938/Pid.B/2015/PN.Mks	50
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaruan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi.¹ Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum.

Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman

¹ Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen ke tiga. Pasal 1 ayat 3

hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan.

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita, mengakibatkan timbulnya tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku kejahatan dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.

Penadahan semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian mengakibatkan semakin maraknya juga tindak pidana penadahan.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, Pasal 481 dan Pasal 482 KUHP. Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan bersangkutan, dalam membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur kesengajaan (*dolus*), yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat di anggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan. Unsur kesengajaan ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu si pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan

kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau penipuan.²

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Tindak pidana penadahan menurut *Code Penal Prancis*, yaitu ;³

“sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *zelfstanding misdriift*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul: **Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penadahan (Studi kasus putusan No. 1938/Pid.B/2015/PN.Mks)** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

² Wirjono Prodjodikoro 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 61.

³ Lamintang 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 362.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan No. 1938/Pid.B/2015/PN.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam perkara tindak pidana penadahan dalam putusan No. 1938/Pid.B/2015/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penadahan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana secara khusus yang dimana akan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni tindak pidana penadahan.
2. Memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih khususnya kepada penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan atau Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan atau analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁴

Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁵

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai Tinjauan Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkan dengan hukumnya, kaidah hukum

⁴ <http://media.informasi.id.com/2012/04/pengertian-defenisi-analisis.html>. pada tanggal 29 April 2015 pukul 23.50

⁵ Surayin 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, Hlm 10.

serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

Kegiatan Analisis Yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan. Tujuannya yaitu untuk membuka pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah penadahan.

2. Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat di hukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.⁶

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

⁶ P.A.F. Lamintang 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya baki, Bandung, Hlm.181.

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” penuh digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.⁸

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :⁹

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (merupakan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut :¹⁰

“suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

⁷ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm. 97.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 23.

⁹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 49.

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* Hlm. 182.

Jonkers merumuskan bahwa :¹¹

“tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Menurut E.Y. kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika ditentukan terlebih dahulu

¹¹ Adami chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 75.

dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulia Poena Sine Praevia Lege Peonali*).

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.¹²

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel dalicten*);
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga di sebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta ommisionis*);
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat di bedakan antara tindak pidana terjadi seketika

¹² Ibid, Hlm 121.

dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;

- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan khusus;
- 7) Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*geweone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoidiege delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak

pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :¹³

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraadyang* terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 208 KUHP;

¹³ P.A.F Lamintang, *OP. Cit*, Hlm 193-194

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri;
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.¹⁴

Batasan tindak pidana oleh teoretis, yakni : Moeljatno, R.Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran *monistis* dan Jonkers, Schravendijk yang merupakan penganut aliran *dualistis*.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :¹⁵

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang

¹⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hlm 79.

¹⁵ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung. Hlm. 98.

3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:¹⁶

1. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindak penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

¹⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 80.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham *duslistis* tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Dibandingkan dengan pendapat penganut paham *monistis* memang tampak berbeda dengan paham *dualistis*. Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁷

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut.¹⁸

1. Kelakuan (orang yang);
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
3. Diancam dengan hukuman;

¹⁷ Ibid, Hlm 81

¹⁸ Ibid

4. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
5. Dipersalahkan atau kesalahan.

C. Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Pengertian penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau definisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, hanyalah menggolongkan. Oleh karena itu kejahatan penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penadahan adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut Undang-Undang maupun agama itu sangat patut diancam pidana, barang siapa yang melakukan kejahatan penadahan.

Dari segi tata bahasa, penadahan berasal dari kata tadah yang merupakan suatu kata jadian atau kata sifat, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja yakni suatu kegiatan tadah yang dilakukan oleh subyek pelaku yang disebut penadah.

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan:¹⁹

Tadah: barang apa yang dipakai untuk menadah.

Menadah: menerima barang apa yang jatuh atau dilemparkan.

Sedangkan tukang tadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian; misalnya akhirnya ia mengaku menjadi tukang tadah barang curian.

¹⁹ Poerwadarminta, 1964, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 989.

Pengertian yang diberikan dalam kamus Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta terlalu sempit, karena adanya pembatasan mengenai barang curian, yang sebaiknya disebut juga menerima barang dari hasil kejahatan lain atau kejahatan tertentu.

Sedangkan pengertian penadahan yang secara tegas hanya dapat dilihat pada rumusan Pasal 480 KUHPidana.

Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari rangkaian kejahatan terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, maka hal tersebut dapat membuat penjahat dibiarkan bertindak lebih leluasa dalam melancarkan aksi dan akan menyulitkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini dapat mendorong pelaku kejahatan menggunakan kesempatan untuk memperdaya orang lain untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang telah diperdaya tersebut.

Pembuat undang-undang membicarakan sesuatu kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan tetapi ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan si penadah, kejahatan yang dilakukan semula, darimana barang itu diperoleh, oleh orang lain. Dalam banyak peristiwa penadahan lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang

bahwa kejahatan itu adalah dari dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi peradilan kita berpegang pada syarat bahwa kejahatan itu dari orang lain.

Jadi menurut penulis, pengertian kejahatan penadahan adalah jenis perbuatan yang dilakukan dengan memberi bantuan kepada pelaku kejahatan terhadap harta atau patut disangkanya adalah penjahat terhadap harta benda, dengan maksud untuk mendapatkan untung atau memberikan kemudahan pada penjahat tersebut untuk melakukan kejahatannya terhadap harta benda setelah harta benda tersebut telah dikuasai oleh penjahat tersebut, baik secara sadar mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan ataupun patut disangkanya bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Dalam Pasal 480 angka 1 KUHPidana ada dua rumusan kejahatan penadahan, rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur objektif :

1. Perbuatan kelompok 1, yakni

- a) Membeli (*kopen*);
- b) Menukar (*inruilen*);
- c) Menerima gadai (*in pand nemen*);

d) Menerima sebagai hadiah (*als geschenk aannemen*), atau

2. Kelompok dua untuk menarik keuntungan (*uit winstbejag*) :

- a) Menjual (*verkopen*);
- b) Menyewakan (*verhuren*);
- c) Menukar (*inruilen*);
- d) Menggadaikan (*in pand geven*);
- e) Mengangkut (*vervoeren*);
- f) Menyimpan (*bewaren*);
- g) Menyembunyikan (*verbergen*).

Objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejahatan.

b. Unsur-unsur subjektif :

- a) Yang diketahuinya (*waarvan hij weet*),
- b) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan (*waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*).

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud diatas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan siding pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

- Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan,
- Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai, atau menerima sebagai hadiah atau pemberian,
- Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut , menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penadahan

Adapun tindak pidana pendahan diatur dalam dalam KUHPidana dalam Pasal 480 sampai dengan Pasal 482 dengan bentukbentuk penadahan adalah sebagai berikut :

a. Penadahan dalam bentuk pokok (Pasal 480 KUHPidana)

Pada pasal 480 KUHPidana diatur sebagai berikut :²⁰

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- dihukum:

- 1) Karena sebagai sekongkol, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima

²⁰ R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, Hlm. 314

hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

- 2) Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

b. Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHPidana)

Pada Pasal 481 KUHPidana diatur sebagai berikut :²¹

- 1) Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 2) Yang bersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1 – 4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu. (K.U.H.P. 35, 480, 486, 517).

c. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHPidana)

Pada Pasal 482 KUHPidana diatur sebagai berikut:²²

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379.

D. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah

“putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan

²¹ Ibid, Hlm. 316.

²² Ibid

perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim” diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya, yaitu menerima putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.

Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Leden Marpung adalah:²³

“putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”.

Bab I angka 11 KUHAP menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi teoritik dan praktik adalah:²⁴

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala sesuatu tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

²³ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana;Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, Hlm. 202.

²⁴ Ibid, Hlm. 203.

2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Secara teoritik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan "*Vrijspraak*", sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan "*Acquittal*". Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa atau Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Putusan bebas dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh karena dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Akan tetapi, menurut penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 191 (1) KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa:²⁵

²⁵ Ibid, Hlm. 218.

- 1) Ketidadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (*negative wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut dalam KUHAP. Jadi, pada prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak cukup membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.
 - 2) Majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah terpenuhi, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*). Pada pasal tersebut di atas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Dengan demikian bahwa titik tolak ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP ditarik suatu konklusi dasar bahwa pada

putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan “perbuatan pidana”.

c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan atau “*Veroordeling*” pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 (1) KUHP dengan redaksional bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP. Selain itu, jika dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 (4) huruf b KUHP

dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat 2 KUHP).

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan bebas (*vrijspraak*), hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa:²⁶

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau dictum putusan hakim.”

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta

²⁶ Ibid, Hlm 193

dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:²⁷

“Pertimbangan *yuridis* adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta *yuridis* yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan *non-yuridis* dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.”

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*), *modus operand* tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum . pertimbangan yuridis dari

²⁷ Ibid, Hlm 194.

tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Menurut Lilik Mulyadi setelah diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain:²⁸

- 1) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- 2) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau penasihat hukum.
- 3) Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

²⁸ Ibid, Hlm. 196.

b. Pertimbangan Sosiologis

Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di negara ini dapat terpenuhi. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini adalah:

“Hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka yang penuh dengan muatan normatif dan diikuti dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif. Dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), pengadilan cenderung dibebani tanggung jawab yang teramat berat dan nyaris tidak terwujud.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar bagi pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati keputusan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, harus juga diperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, yakni hakim harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Sifat tindak pidana (apakah itu suatu tindak pidana yang berat atau ringan).
- b) Ancaman hukuman terhadap tindak pidana itu.
- c) Keadaan dan suasana waktu melakukan tindak pidana tersebut (yang memberatkan atau meringankan).
- d) Pribadi terdakwa yang menunjukkan apakah dia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau

apakah dia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.

- e) Sebab-sebab untuk melakukan tindak pidana.
- f) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (apakah dia menyesal tentang kesalahannya atau dengan keras menyangkal, meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya).
- g) Kepentingan umum.

c. Pertimbangan Subjektif

Perbuatan seseorang yang berakibatkan tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan hukum. Artinya, perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang

memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan pelaku pun tidak perlu dipertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dipersalahkan itu dapat disebabkan karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatan dan dalam keadaan darurat.

- 3) Harus terjadi adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- 4) Harus melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata atau jelas bertentangan dengan aturan hukum.

5) Harus tersedia ancaman hukumnya, kalau ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh pelaku. Apabila dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu dalam tindak pidana, maka pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut menjadi pilihan Penulis sebab Kota Makassar merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang telah mengadili tindak pidana penadahan dengan Nomor: 1938/Pid.B/2015/PN.Mks. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap Penulis dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Tempat yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Makassar. Selain itu, proses penelitian juga berlangsung di Universitas Hasanuddin terkait dengan referensi-referensi yang diperoleh dari studi pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum UIniversitas Hasanuddin.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan

permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.²⁹ Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:³⁰

1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.
2. Data Sekunder, adalah data- data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 14.

³⁰ Ibid. Hlm 12-13.

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum. Data sekunder tersebut terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku – buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka (library research), yaitu buku kepustakaan, artikel, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan

karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

2. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research), yaitu pihak – pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh melalui proses wawancara.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui Proses Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penadahan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Studi Pustaka

Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan – bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang

dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

D. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penadahan (studi kasus putusan No. 1938/Pid.B/2015/PN.Mks)

Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus putusan No. 1938/Pid.B/2015/PN.Mks, menurut penulis perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim, dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1. Posisi Kasus

Adapun posisi kasus dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 1938/Pid.B/2015/PN.Mks, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Suryana, pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober tahun 2015 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di jln. Skarda N Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik untung, menjual, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatut harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendatangi rumah saksi Irwansyah untuk membeli barang yang mana terdakwa sudah seringkali membeli barang-barang hasil curian pada saksi Irwansyah dan pada saat itu terdakwa membeli 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo 14 inch warna hitam milik saksi Ahmad Muliadi dengan harga Rp. 2.500.000.- dan 1 (satu) buah Handphone Samsung S5 Warna putih seharga Rp. 2.400.000.- dengan harga keseluruhan Rp. 4.900.000,- yang mana barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya atau merupakan hasil kejahatan dari saksi Asrul Basir Als. Naba yang kemudian dijual kepada saksi Irwansyah dan terdakwa telah mengetahui bahwa barang tersebut hasil curian, selanjutnya 1 (satu) Unit Laptop dan Hp Samsung S5 tersebut terdakwa jual kepada Wahyu dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 5.200.000,- sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- dari hasil penjualannya.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari Negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan tanggal 22 Desember 2015 dengan Nomer Reg Perkara : PDM- 800/MKS/12/2015 telah didakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Suryana, pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober tahun 2015 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di jln. Skarda N Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik untung, menjual, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatut harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendatangi rumah saksi Irwansyah untuk membeli barang yang mana terdakwa sudah seringkali membeli barang-barang hasil curian pada saksi Irwansyah dan pada saat itu terdakwa membeli 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo 14 inch warna hitam milik saksi Ahmad Muliadi dengan harga Rp. 2.500.000.- dan 1 (satu) buah Handphone Samsung S5 Warna putih seharga Rp. 2.400.000.- dengan harga keseluruhan Rp. 4.900.000,- yang mana barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya atau merupakan hasil kejahatan dari saksi Asrul Basir Als. Naba yang kemudian dijual kepada saksi Irwansyah dan terdakwa telah mengetahui bahwa barang tersebut hasil curian, selanjutnya 1 (satu) Unit Laptop dan Hp Samsung S5 tersebut terdakwa jual kepada Wahyu dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 5.200.000,- sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- dari hasil penjualannya.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- Menyatakan terdakwa Suryana Als Yana bin Hasan Mana bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

4. Analisis Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

Menurut surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum menyatakan terdakwa Suryana Alias Yana Bin Hasan Mana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP akan tetapi menurut penulis pasal yang dikenakan pada terdakwa kurang tepat karna dalam surat dakwaan menyatakan “Terdakwa mendatangi rumah saksi Irwansyah(pelaku pencurian) untuk membeli barang yang mana terdakwa sudah seringkali membeli barang-barang hasil curian pada saksi Irwansyah” dan menurut keterangan terdakwa “Bahwa terdakwa menerangkan telah kenal dengan sdr Irwansyah karena sudah sering membeli barang berupa laptop dan HP dari sdr Irwansyah” maka dari beberapa keterangan tersebut perbuatan terdakwa lebih mencocoki pasal 481 ke-1 yang berisi “Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Jadi menurut penulis terdakwa seharusnya dikenakan pidana Pasal 480 ke-1 KUHP, subsidair Pasal 481 ke-1 KUHP.

5. Amar Putusan

Dalam perkara Nomor 1938/Pid.B/2015/PN Mks, hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa Suryana Alias Yana Bin Hasan Mana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

6. Analisis Hukum

Sifat melawan hukum (*wedderrechtelijkeheid*) dalam ilmu hukum dikenal dua macam yaitu sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum formil. Sifat melawan hukum materiil merupakan sifat melawan hukum yang luas yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya). Jadi walaupun undang-undang tidak menyebutkannya maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum materiil terdiri dari sifat melawan hukum materiil dalam

fungsi positif dan sifat melawan hukum dalam fungsi negatif. Pengertian sifat melawan hukum secara materiil dalam arti positif akan merupakan pelanggaran asas legalitas, pada Pasal 1 ayat 1 KUHP, artinya ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi positif yaitu meskipun suatu perbuatan secara materiil merupakan perbuatan melawan hukum apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Ajaran sifat melawan hukum materiil hanya diterima dalam fungsinya yang negatif, dalam arti bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam surat dakwaan di atas, diketahui bahwa dakwaan JPU berbentuk dakwaan tunggal. Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang Penuntut Umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut. Misalnya Penuntut Umum merasa yakin apabila terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1, maka terdakwa hanya didakwa dengan Pasal 480 ayat 1 KUHP.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan jaksa Penuntut Umum (Rinawati Dahlan, S.H.) berkaitan dengan dakwaan jaksa dalam suratuntutannya dalam perkara diatas terdakwa

Suryana didakwa Pasal 480 ke-1 KUHP yaitu tindak pidana penadahan. Oleh karena itu dakwaan JPU berbentuk dakwaan tunggal maka hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan satu pasal saja, yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP.

Selanjutnya dalam proses persidangan dan sampai pada pengambilan keputusan, akhirnya hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 , maka semua unsur-unsur tentang tindak pidana harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukar, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan, Sesuatu Benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.

Berikut penulis akan uraikan unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan:

1. Unsur Barang Siapa

- Unsur barang siapa yang dimaksudkan adalah setiap atau siapa saja subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum.
- Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan ini adalah Suryana, dengan identitas selengkapnya tercantum dalam surat dakwaan ini dibenarkan dalam oleh terdakwa dan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau menarik keuntungan, menjual,

menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda.

- Dalam suatu tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tergolong sebagai tindak pidana penadahan maka apabila terbukti salah satu unsur maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti dikarenakan uraian unsur di atas bersifat alternative yang apabila terbukti salah satunya maka unsur tersebut telah terbukti.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di jln. Skardan Kota Makassar, dimana terdakwa membeli barang-barang curian berupa 1(satu) unit laptop merk Lenovo seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1(satu) buah handpone Samsung seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual kembali barang-barang hasil kejahatan dari saksi Asrul , yaitu 1 (satu) unit laptop dan

1(satu) unit HP Samsung dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dari rangkaian keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh keterangan bahwa terdakwa telah, membeli, atau karena mau mendapat untung, menjual, membawa, menyimpan, suatu barang. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Yang diketahui atau patut disangkanya, bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan.
 - Bahwa terdakwa dalam hal ini sudah mengetahui bahwa laptop dan handphone tersebut adalah hasil kejahatan, hal ini dapat dilihat dimana terdakwa menemui saksi Irwansyah menjual dengan harga Rp. 2.500.000,- namun terdakwa menganggap harga tersebut sangat murah dengan harga yang tidak wajar atau yang dibeli dibawah harga pasaran dengan harga Rp. 2.600.000,- sehingga barang tersebut patut diduga merupakan barang hasil kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 480 ke-1 telah terpenuhi yaitu dengan adanya keterangan saksi (Muh Firman, Ahmad Muliadi, Asrul Basri dan Irwansyah), surat (surat pernyataan), petunjuk (laptop dan handphone), dan keterangan terdakwa Suryana telah terpenuhi. Sehingga sangat tepat dan beralasan kuat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

B. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan dalam perkara tindak pidana penadahan dalam Putusan No. 1938/Pid.B/2015/PN.Mks

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara tindak pidana penadahan dalam Putusan No. 1938/Pid.B/2015/PN.Mks., didasarkan atas beberapa pertimbangan, hakim dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim belum bisa menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keyakinan untuk memutus perkara ini, majelis hakim memperhatikan alat bukti dan pertimbangan yuridis dalam perkara ini. Adapun alat bukti yang didapatkan dalam perkara ini, yaitu :

a. Keterangan Saksi

1. Saksi Muh. Firman (Saksi Korban)

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2015 bertempat dirumah kost saksi di jl. Bonto tangnga Lr.1 Kec. Rappocini Makassar;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang yaitu : 1 (satu) unit laptop Lenovo 14 inci warna hitam, 4 (empat) buah HP masing-masing 2 (dua) HP Samsung Galaxy warna putih miliknya dan Arnul serta HP Nokia dan blackberry davis.
- Bahwa pada saat kejadian pelaku pencurian datang kerumah kost korban dengan alasan mencari seseorang yang berasal dari Enrekang Duri, lalu pelaku menipu korban dengan alasan mengajak korban untuk ketemu bos dari pelaku, di tengah perjalanan korban diturunkan di jl. Talasalapang dengan alasan pelaku ingin menjemput teman korban yang masih berada di kost, lalu pelaku meminta kunci kamar korban sebagai jaminan agar korban tidak kabur, lalu pelaku menjemput Ariansyah teman korban dan diturunkan di Jl. Bonto Tangnga.
- Bahwa setelah korban tiba di kamar kostnya ternyata sudah berantakan dan barang-barang yang ada didalam kost telah tiada.
- Bahwa dari kejadian tersebut, kerugian saksi ditaksir sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dari saudara saksi.

2. Saksi Ahmad Muliadi

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2015 bertempat dirumah kost saksi di jl. Bonto tangnga Lr.1 Kec. Rappocini Makassar;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang milik sdr. Muh Firman Ardiansyah yang di curi adalah 1 (satu) unit laptop Lenovo 14 inci warna hitam, 4 (empat) buah HP masing-masing 2 (dua) HP Samsung Galaxy warna putih miliknya dan Arnul serta HP Nokia dan blackberry davis.
- Bahwa keseluruhan barang tersebut adalah milik temannya sdr. Muh Fiman Ardiansyah.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dari saudara saksi.

3. Saksi Asrul Basri Als Naba

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2015 bertempat dirumah kost saksi di jl. Bonto tangnga Lr.1 Kec. Rappocini Makassar;
- Bahwa saksi menerangkan sdr. Suryana als Yana sebelumnya ia sudah kenal karena ia adalah temannya.
- Bahwa saksi menerangkan caranya ia bersama dengan lelaki Lucki melakukan pencurian adalah ia berpura-pura dengan cara datang kerumah kost korban lalu memanggilnya keluar dan menanyakan "siapa anak Enrenkang duri yang pukul anaknya bosku?".
- Bahwa saksi menerangka barang-barang yang telah dicuri berupa 1 unit laptop merk Lenovo warna hitam 14 inci tersebut sudah saya jual kepada teman saya sdr. Irwansyah dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu kemudian saksi mengetahui bahwa sdr. Irwansyah menjualnya kembali kepada orang lain yaitu sdr. Suryana dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan selain barang berupa 1 unit laptop merk Lenovo warna hitam 114 inci tersebut yang dicuri di jl. Bonto Tangnga ada juga barang yang pernah dijual kepada sdr. Irwansyah yaitu HP Samsung S5, dan laptop sekitar 8 unit berbagai merk yang dicuri ditempat lain dengan harga sekita Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 unit dan juga pernah menjual barang curian kepada Suryana berupa laptop berbagai merk dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per unit.
- Bahwa saksi menerangkan hasil penjualan barang curian tersebut habis digunakan untuk main judi, beli rokok, dan makanan serta pakaian berupa 1 lembar baju kaos dan celana kain.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pencurian tersebut ia kerumah sdr. Lucki di jl. Skarda kemudia menyuruh orang untuk memanggil sdr. Irwansyah dan ia menawarkan 1 unit Laptop merk Lenovo warna hitam dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu sdr. Irwansyah menawar dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga harga tersebut yang disepakati dan sdr. Irwansyah menjualnya kembali kepada sdr. Suryana dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Saksi menerangkan mengenal namun namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dari saudara saksi.

4. Saksi Irwansyah Als Iwan

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya sdr. Asrul Asl Naba dan sdr. Lucki yang melakukan pencurian di Jl. Bonto Tangnga Ir.1 dan kemudian saksi membeli barang curian tersebut berupa 1 unit laptop merk Lenovo 14 inci warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan setelah membeli barang curian dari sdr Asrul dan sdr Lucki di jl. Skarda pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita dan kemudian saksi jual kembali kepada sdr Suryana pada hari itu juga sekita pukul 17.00 wita.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang ia beli dari sdr Asrul dan Lucki pada waktu itu ialah barang berupa 1 unit laptop merk Lenovo warna hitam 14 inci dan juga 1 unit HP Samsung S5 warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan telah mengetahui bahwa barang yang dibelinya adalah barang curian, namun awalnya tidak tahu dimana Asrul dan Lucki mencuri barang tersebut, nanti setelah dikantor polisi baru saksi tahu bahwa barang tersebut dicuri di Jl. Bonto Tangnga sedangkan Samsung S5 itu ia tidak tahu dimana mereka mencurinya.
- Bahwa saksi menerangkan ia membeli HP Samsung warna putih seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan laptop merk Lenovo tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total semuanya yaitu Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian dia menjualnya kepada sdr. Suryana keseleruhannya Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan sdr. Suryana mengetahui kalau barang-barang tersebut yang dijual kepadanya pada hari itu adalah barang curian.
- Bahwa saksi menerangkan sudah sekita 6 kali ia menjual barang hasil curian yang saya beli dari sdr. Asrul dan Lucki yaitu berupa laptop berbagai merk dan juga HP.
- Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu suami saksi.

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dari saudara saksi.

b. Keterangan Terdakwa

Adapun keterangan terdakwa Suryana als. Yana Bin

Hasan mana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sehubungan telah membeli barang curian dari sdr. Irwansyah.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah membeli barang curian dari sdr Irwansyah di jl. Skarda pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00.
- Bahwa barang-barang yang dibeli dari sdr Irwansyah waktu itu adalah berupa 1 unit laptop merk Lenovo warna hitam 14 inci dan juga 1 unti HP Samsung S5 warna putih.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mengetahui barang-barang tersebut adalah hasil curian namun awalnya tidak mengetahui dari mana sdr Irwansyah peroleh dan nanti setelah dilakukan pemeriksaan baru diketahui bahwa barang tersebut dicuri oleh sdr Asrul dan Lecki di jl. Bonto Tangnga dan korbannya tidak diketahui sedangkan untuk barang berupa Samsung S5 itu tidak tau dari mana mereka curi.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah kenal dengan sdr Irwansyah karena sudah sering membeli barang berupa laptop dan HP dari sdr Irwansyah.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal pula kedua pelaku yaitu Asrul dan Lucki karena keduanya juga pernah menjual laptop curian kepada tersangka.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang yang dibelinya yaitu laptop Lenovo 14 inci warna hitam tersebut dijual lagi kepada lelaki Wahyu di Surabaya.
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli HP Samsung S5 warna putih dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan laptop Lenovo warna hitam 14 inci dengan harga Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total semuanya Rp. 4.900.000- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian di jual kembali kepada lelaki Wahyu keseluruhannya sejumlah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu saksi Irwansyah menjual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan bahwa harga tersebut terlalu murah sehingga terdakwa menaikkan harganya menjadi Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 16.00 wita, ia menghubungi lelaki Wahyu dan menawarkan laptop dan memberitahu juga kalau yang transit di Makassar menuju Surabaya sehingga ketika harganya disepakati Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) maka lelaki Wahyu mentransfer kerekening terdakwa sebanyak jumlah yang disepakati tersebut dan kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mengantarkan barang tersebut berupa laptop Lenovo 14 inci warna hitam dan HP Samsung S5 di Bandara dan di ambil oleh anggota dari lelaki Wahyu.
- Bahwa terdakwa menerangkan menyatakan benar mengenali sdr Asrul yang pernah menjual laptop sedangkan sdr Irwansyah benar telah menjual laptop Lenovo 14 inci pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 wita.
- Terdakwa memiliki seorang istri dan seorang anak.
- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah :

- Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ialah Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya Yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
- Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan kenyataan yang telah diperoleh selama persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta persidangan, dimana keterangan para saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan keterangan terdakwa maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.
- Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka pada terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan hakim yakin kesalahan para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
 1. Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 2. Hal-hal yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.
 - Terdakwa menyesal atas perbuatannya.
 - Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan.

- Hakim mempertimbangkan, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan para terdakwa tersebut sehingga perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Hakim mempertimbangkan, bahwa Majelis hakim berkesimpulan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya karenanya harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara.
- Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, penahanan terhadap terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindari diri dari pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan.
- Hakim mempertimbangkan, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya haruslah dikurungkan dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
- Hakim mempertimbangkan, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

2. Analisis Penulis

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap

terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi keluarga, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Widiarso , S.H., M.H., yang menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan. Setelah itu majelis hakim menimbang apakah ada alasan lain menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa

dinyatakan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatukan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Lebih lanjut menurut Widiarso, S.H., M.H., adapun hal-hal yang meringankan terdakwa pada perkara ini antara lain adalah:

- a) Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan.
- b) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- c) Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan lalu kemudian menjatuhkan putusan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil pada perkara Nomor 1938/Pid.B/2015/PN Mks., adalah tepat. Berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan maka terungkaplah fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi setiap unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam perkara ini, jaksa menggunakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP yang sudah sesuai karena perbuatan perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana penadahan itu sendiri, yaitu unsur barang siapa, unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan. Namun, ada sedikit pandangan penulis yang berbeda terkait surat dakwaan yang dibuat

oleh penuntut umum. Penuntut umum sangat yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penadahan biasa dan menggunakan Pasal 480 ke-1 KUHPidana pada dakwaan tunggal padahal menurut penulis penuntut umum dapat menggunakan dakwaan subsidair dengan dakwaan primair menggunakan Pasal 481 ayat (1) KUHPidana mengenai penadahan sebagai kebiasaan atau sebagai mata pencaharian dengan ancaman hukuman yang lebih berat dan kemudian menggunakan Pasal 480 ke-1 KUHPidana tentang penadahan biasa atau penadahan umum pada dakwaan subsidair.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara Nomor 1938/Pid.B/2015/PN Mks telah sesuai berdasarkan penjabaran keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim.

B. Saran

Adapun saran dari penulis, sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Diharapkan sosialisasi mengenai terhadap peraturan yang berlaku, tindakan yang patut dan tidak patut dilakukan dikarenakan adakalanya masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka telah melakukan sebuah tindakan melanggar hukum, termasuk tentang penadahan yang sebagian besar masyarakat umum tidak mengetahui tentang adanya unsur patut mengetahui dalam penadahan baik dilakukan oleh pihak terkait maupun terhadap pihak-pihak yang mengetahui hal tersebut dan ada aparat yang berwenang menindak secara tegas setiap palaku tindak pidana karena beratnya sanksi memberikan pengaruh besar terhadap pemberian efek jera (*deterrent effect*) dan daya cegah (*preveny effect*) sebagai upaya pencegahan tindak pidana dalam mesyarakat.
2. Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum agar tetap memperhatikan kepentingan umum dan hak-hak seorang terdakwa yang dijamin oleh undang-undang.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iii
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Yuridis	6
B. Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	10
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	12
C. Tindak Pidana Penadahan	16
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan	18
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penadahan	20
D. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim	21

1. Pengertian Putusan Hakim	21
2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim	23
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi Penelitian	35
B. Jenis Dan Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penadahan (studi kasus putusan No. 1938/Pid.B/2015/PN.Mks)	40
B. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan dalam perkara tindak pidana penadahan dalam Putusan No. 1938/Pid.B/2015/PN.Mks	50
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi (2001), *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Erdianto Effendi (2011), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama.
- Lilik Mulyadi (2007), *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung : PT Alumni.
- Mahrus Ali (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pt Citra Aditya bakti.
- _____ (2009), *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Poerwadarminta (1964), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- R.Soesilo (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Surayin (2001), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya.
- Teguh Prasetyo (2011), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Literatur lain

Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen ke tiga.

<http://media.informasi.id.com/2012/04/pengertian-defenisi-analisis.html>. pada tanggal 29 april 2015 pukul 23.50.

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN
(Studi Kasus Putusan No. 1938/Pid.B/2015/PN.Mks)**



OLEH

**EKO SOFYAN EFENDY
B 111 13 349**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**